

Sejarah Sosial Terbentuknya Kabupaten Pasangkayu

Rahmadi Usman¹

¹Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tomakaka Tiwikrama

Corresponding Author: madhiusman@gmail.com¹

Abstract

The aim of this research is to find out the form of community struggle to develop Pasangkayu into a district. To find out the community's social conditions after the formation of Pasangkayu Regency. And to find out about community developments after the name change of North Mamuju Regency to Pasangkayu Regency. This research method uses historical research methods, namely 1. Heuristics (data collection). 2. Source criticism is divided into two types, namely external and internal criticism. 3. Interpretation (data analysis) of various information obtained from various sources. 4. Historiography is intended to write historical events in the form of scientific work using descriptive language and explanations. The research results show that the formation of North Mamuju Regency was based on natural resource factors and the community's inability to view Mamuju Regional Government services as favoritism. Finally, a movement initiated by the people of Sarudu Village was carried out, resulting in a forum called KAPKP (Action Committee for the Establishment of Pasangkayu District) to fight for these ideals. The peak of the struggle, on July 4, 2002, was the expansion of North Luwu Regency.

Keywords: History, Change, Social

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk perjuangan masyarakat untuk membangun Pasangkayu menjadi Kabupaten. Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat pasca terbentuknya Kabupaten Pasangkayu. Dan untuk mengetahui perkembangan masyarakat setelah adanya perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu 1. Heuristik (pengumpulan data). 2. Kritik sumber terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan internal. 3. Interpretasi (analisis data) terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. 4. Historiografi dimaksudkan untuk menuliskan peristiwa sejarah dalam bentuk karya ilmiah dengan menggunakan bahasa dan penjelasan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara didasari oleh faktor sumber daya alam dan ketidakmampuan masyarakat dalam melihat pelayanan Pemerintah Daerah Mamuju yang bersifat pilih kasih. Akhirnya dilakukanlah gerakan yang diprakarsai oleh masyarakat Desa Sarudu, sehingga dibentuklah wadah bernama KAPKP (Panitia Aksi Pembentukan Kecamatan Pasangkayu) untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Puncak perjuangan, pada tanggal 4 Juli 2002, dinyatakan pemekaran dengan Kabupaten Luwu Utara.

Kata Kunci: History, Change, Social

LATAR BELAKANG

Harapan besar setiap masyarakat dapat hidup dan berkembang dalam wilayah otonom yang dapat memberikan kehidupan sosial yang lebih baik. Kekuatan penguasa mempengaruhi banyak elemen kehidupan di Indonesia (Marlina 2016:34) Kekuatan ini kemudian mengakar

dan seakan menjadi semangat tersendiri bagi setiap daerah untuk mengajukan pemekaran sebuah wilayah atau daerah. Hingga akhirnya pada tahun 1998 kekuatan tersebut berhasil ditumbangkan oleh kekuatan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat.

Lahirnya Undang-undang otonomi daerah adalah jawaban dari keinginan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Mamuju di wilayah Budong-budong Pasangkayu (BUPAS). Keinginan untuk memekarkan Kabupaten BUPAS yang dielu-elukan sejak tahun 1970-an belum terwujud. Sehingga pada tahun 1999 mulai kembali disegarkan dalam ingatan untuk memulai hidup dan menciptakan langkah baru.

Kekuatan sosial dalam masyarakat dibangkitkan kembali untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara) merupakan salah satu kabupaten yang belum lama terbentuk dan memisahkan diri sebagai daerah otonom, usaha pembentukan sebuah kabupaten seyogyanya mampu menyatukan persepsi seluruh elemen masyarakat yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Salah satu upaya merealisasikan hal tersebut adalah memaksimalkan kekuatan politik dan kekuatan sosial.

Setiap komunitas memiliki sumber dan potensi modal sosial yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh anggotanya. Suatu masyarakat atau komunitas merupakan suatu potensi modal sosial, dimana komunitas atau masyarakat tersebut memberi kesadaran serta batas terhadap warga termasuk berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan Bersama (Abdullah 2013:1).

Gagasan pemekaran Kabupaten Mamuju Utara lahir disebabkan oleh potensi yang ada di Pasangkayu yang sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjanjikan. Wilayah Pasangkayu juga ditunjang oleh penduduk yang mendiami wilayah tersebut, berbagai suku, ras, dan agama yang mendiami Kabupaten Mamuju bagian utara juga menjadi faktor pendukung wilayah Pasangkayu untuk berdiri menjadi sebuah Kabupaten. Pernyataan di atas didukung oleh Asep Muslin dalam kajian *Unity in diversity*, yakni: Salah satu alasan mengapa prinsip ekonomi harus diterapkan dalam administrasi pemerintahan adalah karena beragamnya suku, ras, dan kultur yang ada diseluruh nusantara. Keberagaman ini akan berpengaruh kepada kekhasan yang terbentuk dari masing-masing birokrasi di tingkat daerah, tetapi tetap dalam satu kersatuan bangsa (*Unity In Diversity*) (Muslim 2008:71)

Kabupaten Mamuju Utara yang dulunya masih tergabung dengan Kabupaten Mamuju dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Terbukti bahwa sarana dan prasarana transportasi masih rusak jika dibandingkan daerah lain yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Perhatian dan jauhnya jarak ibukota kabupaten dan provinsi merupakan pemicu dicetuskannya ide untuk memekarkan

Kabupaten Pasangkayu. Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang memadai adalah hal pokok untuk dilakukan pendekatan terhadap pelayanan birokrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Thoha yang mengatakan bahwa:

Keterbatasan pemerintah untuk memanfaatkan Sumber-sumber daya baik alam, tenaga kerja maupun keuangan tidak bisa lagi dipertahankan. Pengakuan terhadap keterbatasan inilah yang menentukan terhadap upaya upaya desentralisasi kekuasaan. Dalam kaitan ini perlu kiranya upaya privatisasi dilakukan. Privatisasi merupakan suatu upaya mengurangi peran birokrasi pemerintah atau meningkatkan peran sektor swasta, didalam suatu aktivitas atau didalam pemilikan asset (Thoha 2007:15)

Kenyataan sarana jalan yang jauh dan berlubang dari Pasangkayu ke Ibu Kota Kabupaten Mamuju juga menjadi salah satu faktor lahirnya upaya pemekaran ini. Jalan yang panjang dan berlubang itu harus ditempuh dan menyita waktu hingga sehari penuh. Sehingga keadaan ini melahirkan kegelisahan bagi kaum muda Pasangkayu untuk menyatukan kekuatan di kalangan

masyarakat. Kekuatan ini kemudian dimaksimalkan dalam menciptakan sebuah gerakan dalam mencapai target yang dicita-citakan bersama. Sejarah mengajarkan bahwa pemuda selalu berperan dalam menentukan arah masa depan bangsa di saat mengalami kritis. Dewasa ini sekalipun pemuda berada dalam kungkungan masalah yang kompleks, namun masih berpotensi memecahkan masalahnya sendiri (Juwita Rahmadani Manik 2016:290).

Gerakan masyarakat lewat KAPKP menunjukkan kekuatan dalam perjuangan yang dilakukan, mulai dari penyusunan strategi sampai pada perjuangan untuk meloloskan permohonan ditingkat pusat. Sekian lama rakyat hanya dijadikan obyek oleh birokrasi yang tidak bisa memanfaatkan aset daerah sebagai pendapatan daerah yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Harapannya adalah bagaimana pembangunan daerah menjadi bagian penting dari perjuangan pemekaran ini. Sebagaimana Arhamuddin mengatakan: Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks bernegara, kerja besar pembangunan diselenggarakan oleh para pemangku kebijakan sesuai peraturan perundangundangan yang ditetapkan. Dengan demikian, sebuah produk kebijakan, pada hakikatnya adalah instrumen perubahan sosial menuju tatanan dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (Arhamuddin 2016:1)

Fenomena pelayanan birokrasi terhadap rakyat tidak didapatkan, sehingga situasi dibalik dan membentuk sebuah gerakan rakyat untuk menciptakan sebuah perubahan di daerahnya. Ide terbentuknya Kabupaten Pasangkayu bukan hanya bertitik tolak dari potensi alam yang ada di wilayah tersebut, namun ini didorong oleh keinginan masyarakat yang jauh dari pusat kota Kabupaten Mamuju. Jauhnya jarak tempuh dari Pasangkayu ke Kota Mamuju memakan waktu hampir sehari atau sekitar 10 sampai 12 jam, sehingga masyarakat dengan diwakili oleh tim KAPKP tetap memperjuangkan keinginannya untuk memekarkan wilayah Pasangkayu menjadi sebuah daerah yang otonom.

Berbagai rintangan dalam perjuangan tidak henti-hentinya dihadapi oleh para pejuang daerah, namun berkat ketabahan dan kebulatan tekad akhirnya perjuangan pemekaranpun mencapai klimaks dan berakhir pada deklarasi terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 4 Juli 2002 di Jakarta.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni 1. Heuristik (pengumpulan data) dilaksanakan dengan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan untuk mencari literatur sebagai acuan dan teori yang relevan dengan obyek kajian. Sedangkan penelitian lapangan dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. 2. Kritik sumber terbagi dalam dua macam yaitu kritik ekstern dan intern, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui validitas data serta meneliti data yang diperoleh. 3. Interpretasi (analisis data) terhadap berbagai keterangan yang telah didapatkan dari berbagai sumber, analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan. 4. Historiografi dimaksudkan untuk menulis peristiwa sejarah dalam bentuk karya ilmiah dengan menggunakan pemakaian bahasa dan penjelasan yang bersifat mendeskripsikan, sehingga terbentuk penulisan sejarah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Perjuangan Masyarakat Pasangkayu

Lahirnya ide pemekaran tidak serta merta diterima secara keseluruhan oleh masyarakat Pasangkayu. Terbentuknya Kabupaten Pasangkayu telah lama diperjuangkan oleh masyarakat setempat. Sekitar tahun 1968 telah diperjuangkan pula pembentukan Kabupaten BUPAS, yang

meliputi wilayah Budong-budong – Pasangkayu. Pada tahun 1968 telah dicetuskan pula pembentukan kabupaten BUPAS (Budong-budong-Pasangkayu), namun wacana belum terwujud hingga tahun 1999-an. Perjuangan pembentukan BUPAS putus ditengah jalan sehingga tidak membuahkan hasil. Semangat pemekaran lahir dari pemikiran generasi muda Pasangkayu yang saat itu diawali dari wilayah Sarudu. Pemuda yang berada di desa Sarudu menyambut baik adanya Undang-undang otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah menjadi jawaban dari harapan generasi di Pasangkayu untuk memekarkan wilayahnya.

Kesadaran yang dimiliki oleh Yaumil Ambo Djiwa adalah bagian dari semangat untuk membangun dan melakukan perubahan untuk daerahnya. Pada kenyataan saat itu, bukan hanya listrik bahkan kendaraan seperti motorpun susah menempuh perjalanan ke Pasangkayu karena infrastruktur jalan yang tidak bagus. Sementara di Pasangkayu dan sekitarnya memiliki potensi sumberdaya Alam yang berlimpah. Mulai dari kopra, kakao, kayu hitam, jeruk, kelapa sawit, dan lain-lain. Belum lagi potensi tambang emas dan mineral lainnya, yang jika dikelola dengan baik, akan mampu membiayai pembangunan serta mensejahterakan masyarakat Pasangkayu.

Yaumil menginginkan bahwa sarjana yang ada di daerahnya memikirkan bagaimana daerah ini bisa mekar dan melepaskan diri dari kabupaten Mamuju. Pergerakan yang dilakukan semakin melebar ke penjuru Pasangkayu. Yaumil bersama saudara-saudaranya membuat konsep undangan dan pertemuan yang akan segera digelar untuk menyatukan ide dan konsep pemekaran kabupaten. Agus mencoba merancang wadah yang akan digunakan dalam perjuangan nantinya. Agar ide ini terdengar dan disepakati oleh masyarakat umum, maka diundanglah tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh di wilayah desa masing-masing di tiap kecamatan yakni ; kecamatan bambalamotu, Pasangkayu, Baras, dan Kecamatan Sarudu.

Pertemuan yang digelar di aula kantor desa Sarudu memberi kekuatan tersendiri kepada Yaumil dan kawan-kawan. Hingga pada penghujung jalan awal ini menemukan sebuah gerak kongkrit dengan terbentuknya sebuah wadah perjuangan yang disebut Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu (KAPKP). Keterlibatan beberapa tokoh yang berdomisili diluar Mamuju Utara menjadi semangat tersendiri bagi tim KAPKP dalam meniti perjalanan pemekaran. Dalam wilayah Mamuju Utara keterlibatan tokoh di setiap wilayah juga tergambar pada munculnya beberapa pemikir dari sebaran wilayah di Pasangkayu.

Tujuan pemekaran tidak lepas dari cita-cita atau harapan akan terwujudnya kehidupan yang lebih baik dalam sebuah daerah. Salah satu tujuan pemekaran Kabupaten Pasangkayu adalah mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat. Usaha untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat adalah harapan dalam mewujudkan wilayah kabupaten Pasangkayu. Daerah yang berdiri diatas Sumber Daya Alam yang berlimpah yang menjadi penyokong utama pemekaran kabupaten. Akses jalur transportasi juga akan terbuka dengan adanya pemekaran. Arah pembangunan serta penataan wilayah juga menjadi sasaran dalam mewujudkan berdirinya Kabupaten Pasangkayu.

Pertemuan yang menjadi cikal bakal pembentukan kabupaten adalah di desa Sarudu. Tempat konsolidasi awal yang dilakukan oleh tim Komite pembentukan Kabupaten Pasangkayu. Rapat tersebut mencetus sederetan tokoh pembentukan Kabupaten Pasangkayu, sekalipun tetap dilaksanakan konsolidasi lanjutan untuk menghadirkan perwakilan tokoh-tokoh dari desa se-Kecamatan Pasangkayu. Konsolidasi kian dipercepat oleh tim KAPKP dengan melakukan pertemuan di beberapa tempat, maka dilanjutkan dengan pertemuan di Pasangkayu tepatnya pada tanggal 18 Juli 2000. Pertemuan tersebut mengundang tokoh-tokoh dari berbagai desa di Kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan terbesar setelah pertemuan yang dilakukan di Sarudu. Bertindak sebagai penggagas pertemuan adalah Agus Ambo djiwa. Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya

pertemuan bersama, tiada lain adalah untuk menyatukan ide dan gagasan dalam memperjuangkan Wilayah Pasangkayu menjadi Kabupaten.

Memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pasangkayu bukanlah hal yang mudah. Berbagai pengorbanan baik tenaga, waktu dan materi selalu beriringan dengan usaha yang ditempuh oleh para pemrakarsa yang tergabung dalam Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu (KAPKP). Namun tak dapat pula dipungkiri bahwa selain tokoh yang tergabung dalam KAPKP juga ada para pejuang lainnya yang berada diluar, sebut saja para pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pasangkayu (IPPMIP) yang saat itu diketuai oleh Uksin Djamaluddin. Demikian pula KKMSB di Sulawesi Tengah, yang diketuai oleh H. Muhammad Saal, atas nama pribadi memberikan dukungan dan bantuan, namun secara organisasi tidak mengakui adanya bantuan dalam pemekaran Kabupaten Pasangkayu.

Usaha untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat adalah harapan dalam mewujudkan wilayah kabupaten Pasangkayu. Pemekaran daerah otonom akan mengantarkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Dikatakan oleh Abdul Hamid, Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalah pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan publik sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing (Abdul Hamid 2011:536). Daerah yang berdiri diatas Sumber Daya Alam yang berlimpah yang menjadi penyokong utama pemekaran kabupaten. Akses jalur transportasi juga akan terbuka dengan adanya pemekaran. Arah pembangunan serta penataan wilayah juga menjadi sasaran dalam mewujudkan berdirinya Kabupaten Pasangkayu.

Kondisi Sosial Masyarakat Pasangkayu

Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Interaksi dapat terjadi bila dalam kehidupan masyarakat terjadi kontak social yang dinamis. Suatu hubungan yang berlangsung secara kontinyu akan melahirkan kebiasaan baru dalam kehidupan social. Interaksi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kehidupan masyarakat. Manusia adalah mahluk Tuhan yang multi dimensi dan kompleks (Said Agil Husain Al-Munawir 1993:77).

Manusia adalah mahluk sosial dan mahluk budaya. Manusia selalu ingin melakukan kerjasama dan interaksi sosial. Interaksi itu tidak hanya dipicu oleh dorongan kebutuhan ekonomis, biologis, emosional dan sebagainya yang mengikat dirinya, melainkan juga sebagai fitrah yang tak terbantahkan pada dirinya. Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada berbagai fenomena pluralitas. Pluralitas warna kulit, pluralitas etnik, pluralitas agama, dan pluralitas bahasa (M. Amin Abdullah 2000:68–69). Dengan pluralitas tersebut sering menjadi pemicu terjadinya konflik. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan berbagai macam akomodasi yang dapat mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut sehingga terjadi kesepahaman dan pengakuan akan eksistensi terhadap suatu budaya. Dalam konteks ke-Indonesiaan yang identik dengan pluralistic.

Suatu fenomena yang menjadi gejala umum bahwa apabila suatu daerah yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang utamanya dalam bidang ekonomi maka daerah tersebut akan menjadi daya tarik bagi para transmigran maupun imigran untuk datang dan bertempat tinggal di daerah tersebut umumnya para transmigran meninggalkan daerah asalnya di karenakan factor ekonomi, mereka menginginkan adanya kesejahteraan bagi hidupnya yang selama ini dirasakan serba kekurangan. Transmigran Bali memberikan corak adat budaya dan kebiasaan yang berbeda di Kelurahan Martajaya dengan kebudayaan masyarakat asli Mamuju Utara. Perkampungan Bali yang ada di Kelurahan Martajaya dibangun seperti perkampungan Bali yang sesungguhnya yang memang persis dengan perkampungan yang ada

di Bali karena ornament-ornament dan simbol-simbol menghiasi setiap rumah-rumah transmigran Bali. Demikian pula masyarakat Bali yang menetap di Lariang dan Baras. Interaksi transmigran Bali dengan penduduk lokal yang dapat dilihat dalam hubungan perkawinan dengan penduduk asli khususnya kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, misalnya transmigran Bali menikah dengan penduduk lokal.

Keberagaman suku, etnis dan agama di Mamuju Utara menjadikan Pasangkayu laksana Indonesia mini. Berbagai etnis yang hidup didalamnya seperti Mandar, Kaili, Bugis, Lombok, Bali, Jawa, Toraja, dan Makassar membuat Pasangkayu semakin kaya akan khasanah budaya yang tergabung dalam struktur social yang terbentuk secara instan. Hal ini memberi pandangan bahwa Pasangkayu yang terdiri dari berbagai etnis sangat menjunjung tinggi etika moral dalam berinteraksi. Dengan demikian akan tercipta interaksi social yang lebih baik.

Masyarakat merasakan adanya system hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga hidup dalam kerukunan adalah satu-satunya keinginan Bersama masyarakat. Demikian pula kehidupan antar umat beragama. Di beberapa wilayah desa terdapat kerukunan hidup yang digambarkan oleh agama Islam dan Hindu. Kehidupan yang harmonis sudah bertahun-tahun dijalani. Seperti di Martajaya. Kehidupan social masyarakat jauh sebelum pemekaran kabupaten Pasangkayu sudah berjalan dengan baik. Ketiga masyarakat yang beragama Hindu melakukan ritual keagamaannya, maka orang Islam tetap menghargai dan mendukung kegiatan tersebut, begitu pula sebaliknya. Kehidupan saling mendukung menjadi kekuatan Bersama dalam mempertahankan kerukunan antara umat beragama.

Solidaritas sosial masyarakat Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek gotong royong dan aspek bantu-membantu antara sesama masyarakat. Perlu penulis sampaikan bahwa kedua hal tersebut memiliki orientasiyang berbeda, gotong royong dalam masyarakat lebih kepada kegiatan yang sifatnya umum, baik dampak ataupun pengaruhnya dirasakan bersama dalam masyarakat seperti perbaikan jalan, irigasi dan pagar persawahan. Sedangkan kegiatan bantu-membantu lebih mengarah kepada kepentingan individu seperti membangun rumah, membajak sawah dan lain sebagainya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan gotong royong didalamnya terdapat aktivitas bantu-membantu antara individu yang satu dengan yang lainnya, karena hal tersebut mutlak adanya. Jadi, untuk membedakan gotong royong dan bantu-membantu hanya dengan rnengetahui apa yang menjadi tujuan dari aktivitas masyarakat. jika tujuannya untuk kepentingan umum maka itu disebut gotong royong, dan disebut bantu-mernbantu jika tujuannya untuk kepentingan individu ke individu lain. Gotong-royong dapat dikatakan sebagai ciri utama mereka yang tinggal dipedesaan yang berlaku secara turun temurun, sehingga membentuk perilaku social yang nyata kemudian membentuk tata nilai kehidupan sosial. Adanya nilai tersebut menyebabkan gotong-royong selalu terbina dalam kehidupan komunitas sebagai suatu warisan budaya yang patut dilestarikan. Gotong-royong sebagai bentuk solidaritas banyak dipengaruhi oleh rasa kebersamaan antar warga komunitas yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lainnya, sehingga dalam gotong-royong tidak perlu dibentuk kepanitiaan secara resmi melainkan cukup adanya pemberitahuan kepada warga mengenai kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Kegiatan gotong-royong merupakan hasil musyawarah antara sesama masyarakat dan tokoh pemerintah, musyawarah tersebut dengan tujuan untuk mengetahui dalam kegiatan apa, kapan dan dirnana akan berlangsung kegiatan.

Setiap manusia melakukan perubahan-perubahan selama hidupnya. Perubahan dalam masyarakat terjadi begitu saja tanpa kita sadari dan perubahan tersebut berlangsung secara terus menerus. Oleh sebab itu, perubahan social merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Artinya, dimana ada masyarakat, disana pula perubahan sosial sedang

berlangsung. Perubahan yang terjadi pada masyarakat tentunya tidak terjadi begitu saja, namun telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemudian masyarakat mulai berubah, sehingga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dahulu (tradisional) menjadi modern. Akibatnya mulai luntur kebersamaan masyarakat sehingga terjadi pudarnya solidaritas masyarakat dan menjadi masyarakat yang individual.

Hubungan-hubungan yang terjalin dalam masyarakat akan melahirkan suatu interaksi sosial. Interaksi sosial antara komunitas Islam, Kristen dan Hindu terdapat pada beberapa aspek seperti aspek sosial, aspek budaya dan aspek ekonomi. Kekuatan solidaritas ini tergambarkan pula pada pernyataan Dyah Emarikhatul Purnamasari mengatakan, Perbedaan agama dimasyarakat tidak menjadi konflik, namun menjadi kekuatan untuk meningkatkan solidaritas masyarakat (Purnamasari 2015:162).

Perubahan Sosial

Perubahan social yang secara signifikan tidak terasa bila dilihat dari waktu perubahan nama hingga sekarang. Namun perubahan ini dimaksudkan untuk menjabarkan dinamika yang terjadi sejak terbentuk hingga adanya perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Pasangkayu. Perubahan bukan hanya terjadi dalam masyarakat social namun juga terjadi pada struktur pemerintahan serta kebijakan yang ada. Khususnya perubahan pada nama kabupaten yang dulunya Mamuju Utara kini berganti Pasangkayu.

Perubahan ini berdasarkan latar belakang history bahwa Mamuju Utara memang berasal dari nama Pasangkayu yang juga sebagai cikal bakal terbentuknya Kabupaten.

Berbeda halnya dengan kehidupan para transmigrasi yang hidup di bagian selatan Pasangkayu. Terbentuknya kelompok pekerja transmigrasi menjadi segregasi social tersendiri. Hal ini terlihat pada kehidupan kelompok masyarakat transmigrasi seperti Jawa, Bali dan Lombok. Setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Kehidupan masyarakat Pasangkayu melaju dalam hal perubahan. Perubahan itu menyangkut nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Sebagaimana Muhammad Yusran mengatakan:

Perubahan selalu berlaku pada semua masyarakat, setiap saat di manapun manusia hidup dan berada, walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun, masyarakat yang di dalamnya terdiri atas banyak sekali individu akan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang kecil sampai taraf perubahan yang sangat besar bagi aktivitas atau perilaku manusia. Perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit dapat meliputi aspek perilaku dan pola pikir individu. Aspek yang luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat memengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang (Yusran 2016:136)

Ide perubahan nama kabupaten Mamuju Utara menjadi Pasangkayu berawal dari adanya kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi barat (KKMSB) yang bertajuk dengan Sumber daya manusia yang berilmu, berbudaya dan berkarakter kita membangun sulbar menuju masyarakat madani. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012 di Hotel Blok M Pasangkayu dengan menghadirkan sejarawan nasional Anhar Gonggong. Kegiatan Seminar tersebut termuat dalam koran Radar Sulbar edisi tanggal 28 September 2012. Pada pertemuan ini Anhar Gonggong menguraikan penjelasan Mamuju Utara secara historis.

Perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sejarah, budaya, adat istiadat, dan faktor sosial masyarakat Kabupaten Pasangkayu. perubahan nama Mamuju Utara menjadi Pasangkayu merupakan hal

yang tepat. Mengingat secara historis nama Mamuju Utara memang awalnya adalah Pasangkayu yang berasal dari Kata "*vova sanggayu*" yang berarti sebatang pohon yang menjadi cikal bakal penamaannya sampai sekarang. Perubahan nama Mamuju Utara menjadi Pasangkayu seakan mengembalikan jati diri masyarakat Pasangkayu yang selama ini hilang.

Organisasi sosial yang merupakan gabungan dari kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu susunan atau struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat, dimanahubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur. Secara luas organisasi sosial diartikan sebagai jaringan tingkah laku manusia dalam ruang lingkup yang kompleks pada setiap masyarakat.

Secara ringkas organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pelapisan terstruktur hubungan antar manusia yang saling ketergantungan (Syani 2007:115).

Organisasi social di Pasangkayu tumbuh menjamur, namun hanya sedikit yang menunjukkan identitas kerjanya di masyarakat. Mulai dari organisai kepemudaan sampai pada organisasi paguyuban wilayah dan paguyuban etnis dan suku. Organisasi paguyuban seperti Kerukunan Keluarga Wajo, kerukunan Keluarga Pinrang, Kerukunan keluarga Jawa. Kerukunan Keluarga Bumigora (Lombok/NTB). Sementara organisasi pemuda seperti Karang Taruna, KNPI, Pemuda Ansor dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya. Organisasi ini menjadi penyokong diamika social yang ada di Pasangkayu. Organisasi banyak membantu itu hanya karang Taruna yang berada di desa. Sebagaimana Sahabuddin mengatakan, Karang taruna banyak membantu namun hanya di tingkat desa, bila organisasi yang gaungnya besar belum jelas gerakannya di Pasangkayu Sejatinya karang taruna memang lebih banyak bergerak di desa/kelurahan. Karang taruna lebih banyak bergerak menyelesaikan masalah dan memiliki kepedulian. Sebagaimana Febri Fajar Pratama dan Rahmat mengatakan Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial masyarakat berbasis kepemudaan yang didirikan atas dasar kepedulian kaum muda terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat (Pratama and Rahmat 2018:172).

Selain itu hadir pula pembangunan Tugu Smart yang merupakan symbol kejayaan Pasangkayu yang juga mempengaruhi perubahan social. Tugu Smart merupakan symbol kesejahteraan masyarakat yang diawali dari adanya program Gema d'SMART yang dicanangkan oleh Agus Ambo Djiwa selaku Bupati. Sebagaimana Ayu Arman dalam bukunya mengatakan: Gema d'Smart adalah Gerakan membangun pedesaan. Gerakan ini dicanangkan Agus Ambo Djiwa untuk mempercepat proses pembangunan desa. Filosofi "Gema d'Smart" ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan masyarakat serta mengelola sumber daya pedesaan guna mempercepat penghapusan kemiskinan dan keterbelakangan. Maka, sasaran utamanya adalah desa-desa. Karena Sembilan puluh persen penduduk Mamuju Utara tinggal di pedesaan (Arman n.d.:203)

Desa merupakan unit terkecil yang menyediakan berbagai kebutuhan, kekuatan, dan kesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Program desa smart mulai dilaksanakan tahun 2012 dan bertahap serta bergilir dari desa sat uke desa lainnya. Pada kegiatan tersebut pelayanan SKPD dilaksanakan di desa sehingga dikatakan pula bahwa Gerakan desa smart juga merupakan upaya mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat desa. Hal senada juga diungkapkan oleh Arhamuddin: Pelaksanaan kegiatan program GEMA d'Smart merupakan salah satu bentuk pendekatan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan serta pembinaan terhadap masyarakat desa, hal ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama dua hari di masing-masing desa yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan program.

Tujuan dari program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat adalah untuk mendorong dan membangun kemandirian desa sebagai pilar utama menggerakkan perekonomian desa, menguatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung dengan swadaya gotong royong masyarakat berbasis potensi dan keunggulan lokal yang tersedia. (Arhamuddin 2016:3)

Gerakan membangun Desa Sejahtera, Mandiri dan bermartabat (Gema d'smart) merupakan cikal bakal terbangunnya tugu smart. Konsep yang disematkan ialah bernama Smart. Bukan smart pada umumnya. Konsep Smart yang diterapkan mempunyai sejumlah makna. Bicara Filosofi, SMART bermakna Sauraja atau pusat pemerintahan, Masjid, Alun-alun dan Ruang Terbuka. Tak hanya itu, untuk konsep itu juga berfokus ke pembangunan, yakni Smart (sistem, manusia, alam, ruang, dan teknologi).

Pemerintah juga telah membangun Masjid terapung yang terletak di kawasan pantai Pasangkayu menjadi ikon baru di daerah Pasangkayu. Masjid yang dinamakan Nafsul Kiffah diresmikan oleh Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar, Kajati Sulbar Darmawel Aswar, dan Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa di Anjungan Pantai Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019. Pembangunan masjid terapung di anjungan pantai ini bertujuan agar para pengunjung yang ingin sholat tidak kesulitan lagi mencari masjid terdekat, karena tersedia masjid di kawasan tersebut.

Kesimpulan

Perubahan social di Pasangkayu berjalan seiring pembangunan yang begitu pesat. Terbangunnya infrastruktur daerah yang bersimbolkan SMART, Sejahtera mandiri dan bermartabat. Bila diterjemahkan kedalam pemerintahan, maka Smart berarti Sistem / Souraja (kantor Bupati, DPRD). Masjid didalamnya ada manusia dan Alun-alun Ruang kota yang dibangun untuk memanjakan mata bagi para pengunjung.

Perubahan nama kabupaten Pasangkayu bukanlah hal yang tanpa arti. Melainkan perubahan tersebut berdasarkan aspek budaya dan kearifan local masyarakat Pasangkayu. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang terjadi bukan perubahan tapi pengembalian nama yang pernah ada yakni pasangkayu namun dirubah seiring perjuangan pembentukan Kabupaten. Nama Pasangkayu berasal dari Vovasanggayu yang merupakan jati diri masyarakat Pasangkayu.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Hamid. 2011. **"Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik."** Jurnal *Academica Fisip Untad* Volume 03(Nomor 1).
- [2] Abdullah, Suparman. 2013. **"Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas."** *SOCIUS* 12(Januari).
- [3] Arhamuddin. 2016. **"Evaluasi Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, Dan Bermartabat Di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara."** *E Jurnal Katalogis* 4(Nomor 5).
- [4] Arman, Ayu. n.d. Ir. H. Agus Ambo Djiwa MP. ; **Memimpin Mamuju Utara Dengan SMART Sebuah Biografi.** Jakarta: Nala Publishing House.
- [5] Juwita Rahmadani Manik. 2016. **Analisis Peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (Psp3) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.** Vol. XXI.

- [6] M. Amin Abdullah. 2000. *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Cetakan I. Bandung: Mizan.
- [7] Marlina. 2016. *Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah diBuku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004*. Vol. 4.
- [8] Muslim, Asep. 2008. *Reformasi Birokrasi ; Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Perca.
- [9] Pratama, Febri Fajar, and Rahmat. 2018. “*Peran Karang Taruna Dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda Sebagai Gerakan Warga Negara.*” *Jurnal Civics: MediaKajian Kewarganegaraan* Volume 15(Nomor 2).
- [10] Purnamasari, Dyah Emarikhatul. 2015. “*Solidaritas Mekanik Komunitas Islam Dan Kristen Di Desakamijoro Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.*” *Forum Ilmu Sosial* Volume 42(Nomor 2).
- [11] Said Agil Husain Al-Munawir. 1993. *Fikh Hubungan Antar Agama*. Cetakan ke. Jakarta: Ciputat Press.
- [12] Syani, Abdul. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [13] Thoha, Miftah. 2007. *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [14] Yusran, Muhammad. 2016. “*Dinamika Sosial Kehidupan Pengusaha Warung Makan.*” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* III:2.